

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

HR. Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Indra J. Piliang, dkk (ed), 2003, *Otonomi Daerah, Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan Partnership Governance Reform in Indonesia.

Johan, Bahder, 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju

Kansil, C.S.T. 1988, *Desa Kita: Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Rondineli, Dennis A, 1981, *Government Decentralization in Comperative Perspective. Theory and Practice in developing Country, International Review of Administrative Science*.

Rudy, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Indepth Publishing.

Saragih, Juli Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

----- dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Bandung: Rajawali Pers.

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokusmedia.

- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukrino, Didik, 2012, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press.
- Tjandra, W. Riawan, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT Grasindo.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Widjaja, Haw, 2001, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yuswanto, 2012, *Hukum Desentralisasi Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yuswanto, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Lampung: Justice Publisher.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang direvisi menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, yang direvisi menjadi Undang-undang No.33 tahun 2004.
- Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014.
- PP No. 60/2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang No. 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2014.

Sumber Lain

<http://sp.beritasatu.com/home/tiap-desa-dapat-dana-rp-14-miliar/47384>

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114512&val=5238>

<http://apbnnews.com/kawal-apbn/rincian-dana-desa-apbnp-2015/>

<http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/149-artikel-kekayaan-negara-dan-perimbangan-keuangan/20129-efektifitas-penggunaan-apbdes-melalui-pengadaan-barang-jasa>